

BAB I

PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk protes atau perasaan tidak puas beberapa waktu yang lalu, semakin santer terdengar di beberapa media massa atau bahkan di negara-negara bekas jajahan Jepang, perihal kebijakan Jepang yang enggan meminta maaf ataupun menyesali apa yang telah mereka lakukan di negara-negara jajahannya. Yang paling santer terdengar adalah korban-korban para Jugun Ianfu yang merasa keganasan perang telah menyeret mereka ke dalam kubangan derita. Hak asasi mereka sebagai manusia diinjak-injak. Mereka diculik, dibujuk, ditipu, dan kemudian dijerumuskan ke dalam lingkaran perbudakan seks tentara Jepang yang dikenal dengan istilah jugun ianfu.

Jadi, sangatlah wajar seandainya mereka semua menuntut hak-haknya untuk mendapatkan imbalan yang setimpal setelah sekian lama menanggung malu dan penderitaan yang sangat hebat. Untuk mendapatkan pengakuan atas apa yang mereka alami selama Perang Dunia II, dan santunan ganti rugi, itulah yang dinantikan para bekas Jugun Ianfu. Tapi di pihak Jepang, mereka menganggap masalah tersebut sudah selesai dan segala bentuk permintaan maaf akan tetap berpegang pada “Kono Statement” (pernyataan Kono) 1993 yakni pernyataan Yohei Kono, Chief Cabinet Secretary saat itu, yang menyatakan Jepang telah meminta maaf dan menyesali terjadinya tragedi tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang merupakan negara besar dan kuat pengaruhnya pada masa itu. Jepang mencoba memperluas wilayahnya dengan cara menjajah negara-negara disekitarnya. Terlebih negara-negara yang lemah pengaruhnya dalam kancah internasional.

Dulu, Jepang dikenal sebagai Negara penjajah perang. Hal ini karena Jepang di era tahun 1940an dan sebelumnya Jepang adalah bangsa yang Imperialis. Yang selalu menjajah Negara-negara disekitarnya kemudian memperluas wilayah kekuasaannya. Image kejam, sadis, dan tidak berperikemanusiaan melekat kental pada Jepang karena berbagai macam kejahatan perang yang telah mereka lakukan di Negara-negara jajahan. Jepang adalah salah satu Negara yang terkuat di dunia saat itu. Tapi setelah Jepang menyerah terhadap sekutu pada Perang Dunia II, Jepang mengalami kehancuran total. Mulai dari infrastruktur, perekonomian, bahkan militer, semuanya lumpuh setelah dua bom atom dijatuhkan oleh pihak sekutu ditengah-tengah Negara Jepang

Tapi setelah kekalahan tersebut, Jepang banyak mendapatkan bantuan dari pihak sekutu terutama Amerika Serikat, baik itu berupa materi ataupun transfer teknologi guna untuk membangun kembali tatanan Negara dan perekonomian yang telah mengalami lumpuh total. Jadi sangatlah mungkin, kalau Jepang bisa

langsung kuat padahal beberapa waktu sebelumnya Jepang adalah pihak yang kalah total dalam Perang Dunia II melawan pihak sekutu. Fase-fase perjalanan berikutnya, Jepang makin melebarkan sayapnya untuk menguasai perekonomian regional, terutama di Asia Pasifik.

Jepang sebelum perang dunia II berakhir adalah negara imperialis, dengan menjalankan paham fasisme seperti Jerman dan Undang-Undang Meiji. Imperialisme sebagai ideologi terdapat selama akhir periode Tokugawa, mengatakan bahwa Jepang harus memantapkan kekuasaan nasionalnya dengan jalan menaklukkan Korea, Manchuria, dan Cina. Ideologi ekspansionis ini dianut para pemimpin Meiji yang karena berasal dari kelas bekas pejuang, tentu saja cenderung berpendapat bahwa golongan lemah ditakdirkan untuk diperintah golongan kuat. Dan sebagian besar dari tanggung jawab imperialis harus dipikulkan pada pemerintah Meiji yang menempatkan tekanan terlalu kuat pada aspek militer dalam mewujudkan Negara modern¹.

Jepang secara tegas mengejar kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan menunjukkan politik luar negeri yang berdiri sendiri. Dalam membentuk persekutuan dengan negara-negara lain, seperti dalam blok poros Tokyo-Berlin-Roma, Jepang tetap menunjukkan kebebasan yang besar². Sejak akhir abad ke-19 Jepang telah mulai bersikap agresif terhadap wilayah terdekat di sekitarnya. Pertama kali Jepang perang dengan Cina dan berakhir pada tahun 1895 dan

¹ Yoshihara Kunio, *Perkembangan Perekonomian Jepang*, PT Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 121-122

² Sayidiman Suryohardiprojo, "Belajar dari Jepang"; *Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, UI Press, 1987, hal.274.

Jepang berhasil memperoleh pulau Taiwan serta beberapa bagian daratan Cina. Sedangkan pengaruhnya di Korea mulai nyata sekalipun secara resmi baru setelah menjadi jajahnya pada tahun 1910. Karena perluasan pengaruh di Cina, Jepang cepat bertentangan kepentingan dengan Rusia di Manchuria. Kepentingan Rusia di Manchuria pun besar, karena adanya wilayah Rusia dipantai pasifik. Nampaknya kemenangan atas Cina membuat Jepang yakin akan kekuatan angkatan perangnya sehingga amat diandalkan dalam mengejar politik luar negerinya. Maka pertentangan kepentingan dengan Rusia tidak hanya diusahakan untuk diselesaikan secara diplomasi, tetapi juga menggunakan kekuatan militernya. Akhirnya terjadi perang antara Jepang dengan Rusia pada tahun 1904-1905.³

Dalam perang itu Jepang membuktikan kemajuan besarnya dalam membentuk kekuatan militer yang setaraf dengan dunia Eropa. Dunia dibuatnya terpesona, oleh karena di daratan maupun di lautan, Rusia dikalahkan secara menentukan sekalipun membawa korban besar di kedua pihak. Dengan kemenangan ini industri Jepang memperoleh daerah penghasil bahan-bahan baku dan daerah pasaran untuk produksinya yang luas. Akhirnya Jepang terus menjadi negara penjajah dan mulai menguasai Asia Timur dan Selatan. Dan akhirnya Jepang harus mengakui kekalahan setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dibawah perjanjian San Fransisco, Jepang harus mengakui dan harus

³ *Ibid*, hal.275

mengadakan perubahan sesuai dengan petunjuk Amerika, terutama mengenai Undang-undang Meiji dan menjalankan demokrasi di dalam negeri Jepang

Seperti yang kita tahu, seperti bagaimana dulu Jepang sempat menjajah negara kita dengan segala kekejaman dan kekuasaan yang dimilikinya, Jepang bertindak sewenang-wenang layaknya raja yang menindas rakyat kecil yang tidak berdaya. Tentara Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda sebagai ”saudara tua”. Mereka berjanji akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Rakyat sebuah negeri yang ratusan tahun dikuasai penjajahan Belanda serta merta tertarik pada janji-janji itu. Meski janji tak pernah terwujud, demi kepentingan perang di Asia Pasifik, Jepang merampas perbekalan, dan tenaga manusia di tanah Pertiwi untuk membangun industrinya. Tentara Jepang juga mengumpulkan laki-laki usia 16 sampai 40 tahun dan perempuan 16 hingga 25 tahun yang direkrut dari desa-desa di seluruh Tanah Air. Mereka dijadikan romusha dan budak seks. Sebagian besar perempuan itu dipaksa menjadi jugun ianfu dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat, ancaman, dan teror. Mereka kemudian dimasukkan ke sebuah tempat khusus yang disebut ian-jo, sebutan bagi rumah bordil ala Jepang⁴

Penjajahan pastinya banyak memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Cerita kengerian dan kesadisan dari Tentera-tentara penjajah Jepang, telah menghiasi perjuangan bangsa-bangsa di Asia terutama, dalam mengusir Tentara

⁴ Jugun Ianfu, *Luka Itu Tersiram Cuka*, 2007, diakses pada tanggal 30 November 2007
<http://www.comfort-women.org>

Jepang. Jepang akhirnya memang harus mengakui kekalahannya terhadap Sekutu, tetapi kekalahan Jepang dalam perang tersebut ternyata menyisakan luka yang sangat mendalam terutama pada ratusan ribu perempuan di Asia. Mereka adalah korban praktek Jugun Ianfu yang dilakukan oleh Militer Jepang.

Jugun Ianfu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita penghibur, yang terlibat dalam perbudakan seks selama Perang Dunia II di koloni Jepang. Jugun Ianfu merupakan wanita yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di negara-negara jajahan Jepang.

Dalam perang dunia ke II, sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi budak seks tentara kerajaan Jepang untuk memenuhi kebutuhan seks para serdadunya. Mereka di tempatkan di rumah-rumah bordil di kamp-kamp basis Militer Jepang. Mereka menerima siksaan sekaligus perkosaan setiap hari dan perlakuan kasar dari tentara Jepang. Profesor Yoshiaki Yoshimi dari Univeritas Chuo juga menyatakan terdapat lebih dari 2.000 kamp yang menampung lebih dari 200.000 perempuan Korea, Cina, Filipina, Taiwan, Myamar, Belanda, Australia, dan beberapa negara Eropa untuk menjadi jugun ianfu.⁵ Hal ini berlangsung terus menerus selama pemerintahan Jepang masih berkuasa. Penderitaan-penderitaan yang dialami para Jugun Ianfu tentu akan membayangi terus sampai kapan pun, dan penderitaan cacat fisik dan trauma secara psikologi

⁵ Jugun Ianfu, *Jepang Bantah Perbudakan Seks pada Perang Dunia II*, Maret 2007, diakses tanggal 30 November 2007, <http://www.vhr.or.id/home/index.php?id=view&aid=4098&lang=>

dan seksual akan kejadian penyiksaan tersebut akan menakuti mereka selama hidupnya.

Dengan penderitaan seperti itu wajar jika melihat fenomena yang terjadi, yaitu sikap protes keras dari beberapa negara, terutama korban Jugun Ianfu terhadap pernyataan maupun sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin Jepang menanggapi kasus Jugun Ianfu ini. Pernyataan-pernyataan yang menolak, ataupun sikap yang ditunjukkan dengan mengunjungi kuil Yasukuni adalah contoh bentuk pengingkaran sejarah yang dilakukan oleh negara Jepang. Bagi para korban Jugun Ianfu, kunjungan para petinggi pemerintahan Jepang ke kuil Yasukuni sangatlah menyakitkan. Karena selain akan mengembalikan kenangan pahit dimasa lalu, kuil Yasukuni adalah kuil yang dibangun untuk menghormati tentara Jepang yang tewas dalam Perang Dunia II.

Walaupun akhirnya pihak Jepang mengutarakan permohonan maafnya, namun permintaan maaf ini pada kenyataannya tidak diikuti dengan sikap menerima kenyataan sejarah di masa lalu sehingga kesan yang timbul justru, Jepang sepertinya tidak peduli dengan perasaan bangsa-bangsa yang pernah tersakiti oleh agresi militernya di masa lalu; dan Jepang ingin menyampaikan kepada generasi mudanya bahwa perbuatan militer mereka di masa lampau tidak lain adalah "insiden kecil" dalam peperangan sehingga tidak ada yang perlu disesalkan.

Jadi, sangatlah wajar seandainya para Jugun Ianfu menuntut hak-haknya untuk mendapatkan imbalan yang setimpal setelah sekian lama menanggung malu dan penderitaan yang sangat hebat. Untuk mendapatkan pengakuan atas apa yang mereka alami selama Perang Dunia II, dan santunan ganti rugi, itulah yang dinantikan para bekas Jugun Ianfu.

Kim Hak Sun, seorang wanita pemberani dari Korea Selatan pada tahun 1991 membuka suara tentang perlakuan para tentara Jepang di masa perang Dunia II. Dari penuturannya tersebut, dunia tersentak. Kim Hak Sun menceritakan kisahnya sebagai budak nafsu para tentara Jepang yang menginvasi wilayah Korea dan sekitarnya di awal tahun 1940-an. Kisah hidupnya ini segera membuka mata dunia bahwa pasukan tentara Jepang di era Perang Dunia II ternyata meninggalkan luka yang mendalam bagi kaum wanita di Asia. Dari sinilah, para mantan Jugun Ianfu diseluruh Asia segera memberanikan diri membuka suara. Wanita-wanita dari Korea, Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia segera membukanya. Untuk di Asia Tenggara sendiri, para mantan Jugun Ianfu banyak terdapat di Indonesia. Ada ribuan wanita yang telah menjadi saksi bisu kekejian tentara Jepang pada era PD II⁶.

⁶ *Budak Nafsu - A Memoir of Jugun Ianfu*, Desember 2007, diakses tanggal 9 Maret 2008, <http://katawaktu.multiply.com/journal/item/41>

Puluhan tahun sejak kalah dalam Perang Dunia II, Jepang menolak mengakui keterlibatannya dalam jugun ianfu. Pemerintah menyebut kamp-kamp di banyak negara itu dikelola swasta dan dijalankan para pekerja seks komersial. Namun pada 1992 sejarawan Yoshimi Yoshiaki memperoleh arsip milik Departemen Pertahanan Jepang pada masa Perang Dunia II yang mengindikasikan keterlibatan militer dalam menjalankan kebijakan jugun ianfu. Salah satu temuan itu menyebutkan militer Jepang terlibat dalam memilih agen yang melakukan perekrutan.

Saat temuan Yoshimi dipublikasikan di media massa pada 12 Januari 1993, Jepang kemudian menjadi gempar. Karena tekanan dan kegemparan itu, Chief Cabinet Secretary, Yohei Kono terpaksa mengakui fakta tersebut dan menyatakan minta maaf atas terjadinya peristiwa tersebut. Yang kemudian pernyataan ini dikenal dengan “Pernyataan Kono 1993” (Kono Statement 1993). Permintaan maaf itu, mengakui peran militer Jepang dalam membangun dan mengelola rumah-rumah bordil semasa perang. Yoshiaki Yoshimi, juga menyatakan sekitar 200.000 ribu wanita Korea, Filipina dan China telah dipaksa menjadi penghuni rumah-rumah bordil dekade 1930-an dan 1940-an. Keterangan sejarawan ini membuat pemerintah Jepang meminta maaf secara resmi pada 1993 dan menjadi dasar untuk pemberian kompensasi.⁷

⁷ http://canine.com/hot_issues/article.php?article_id=502, diakses tanggal 30 November 2007

Padahal dengan kebijakan Jepang yang meminta maaf atas kasus Jugun Ianfu ini dan sikap menyesali semuanya, secara tidak langsung mereka tidak mengakui perjuangan para pahlawannya yang telah berjuang mati-matian di masa lalu demi Negara Jepang.

Pengakuan Kono ini juga yang kemudian melahirkan terciptanya Asian Women's Fund tahun 1995, yang mulai memberi kompensasi bagi sekitar 285 bekas korban ianfu dari Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan. Setiap orang disantuni dua miliar yen (The Asahi Shimbun, 25/1/1995)⁸.

Hal inilah membuat penulis untuk meneliti Kebijakan Politik “minta maaf” Jepang mengenai kasus Jugun Ianfu tersebut.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka timbul suatu permasalahan sebagai fokus penelitian dengan pertanyaan : “Mengapa Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Khicii Miyazawa melakukan kebijakan *politik minta maaf* (Pernyataan Kono 1993) mengenai Jugun Ianfu? ”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

⁸ http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=8318&coid=3&caid=31&gid=1of Asian Studies Nanzan University, Nagoya, Japan, diakses tanggal 30 November 2007

Untuk dapat menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis mencoba menerapkan Teori dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar pengkajian masalah ini semakin terarah dan jelas. Adapun Teori yang penulis gunakan untuk mengkaji dan meneliti politik minta maaf Jepang mengenai Jugun Ianfu adalah Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri. Sebelum menguraikan teori yang dipakai didalam menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan disampaikan apa yang disebut teori itu sendiri. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.⁹

Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri

Dalam membahas permasalahan yang timbul dalam dalam skripsi ini penulis menggunakan **Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri atau *foreign policy* oleh William D. Coplin**, yang berasumsi:

“ akan tetapi salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya

⁹ Mochtar Mas' oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional* PAU UGM.(Yogyakarta 1988). Hal. 121

tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer, dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam sistem itu”.¹⁰

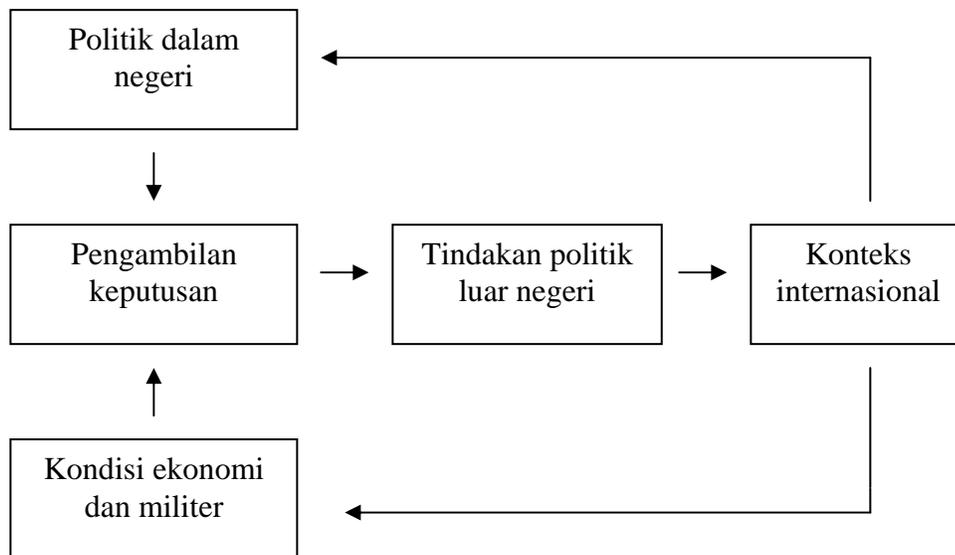
Politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, kepentingan nasional ini dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan rencana-rencana yang dituju oleh suatu negara.¹¹

¹⁰ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung, CV Sinar Baru, 1992, hal. 30.

¹¹ Supri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Gambar 1.1

Skema Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri William D. Coplin



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, Bandung, CV Sinar Baru, 1992, hal. 30.

Dari skema tersebut, terlihat kaitan-kaitan antara kondisi ekonomi, militer, politik dalam negeri dan konteks internasional, disini diartikan sebagai produk dari berbagai politik luar negeri pada masa lampau.

Coplin menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual

dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam hubungan dengan aktor lain. Pengambilan suatu tindakan luar negeri sebenarnya lebih merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak pertimbangan dan sangat kompleks.

Seperti yang diasumsikan oleh Coplin bahwa tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan ekonomi dan militer, dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam system itu.

Begitu juga dengan Jepang dalam pengambilan keputusan politik minta maaf ini dipengaruhi 3 faktor diatas.

1. Situasi Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri membawa dampak besar terhadap politik luar negeri suatu negara. Hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik atau "*Policy influencers*" dalam negeri sangat erat dalam menentukan suatu kebijakan. *Policy influencers* akan selalu berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri. Menurut William D. Coplin, *Policy*

influencers ada empat. Pertama, Birokrat; kedua, Partai-partai politik; ketiga, Kepentingan; dan keempat, opini publik.¹²

Dalam pengambilan kebijakan politik minta maaf Jepang ini, faktor opini publiklah yang sangat berperan dalam mempengaruhi proses kebijakan tersebut. Karena Setelah ditemukannya dokumen-dokumen resmi milik pemerintah yang menyangkut Jugun Ianfu di tahun 1992, dan kemudian di publikasikan di surat kabar harian nasional Ashasi Shimbun, masyarakat Jepang kemudian jadi gempar dan menginginkan kejelasan dari pemerintah. Jepang merasa perlu memberi suatu keterangan menyangkut isu Jugun Ianfu tersebut. Hal ini dilakukan Jepang karena melihat situasi politik dalam negeri Jepang yang menuntut adanya ketegasan dari pemerintah.

2. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Faktor yang kedua adalah Kemampuan ekonomi dan militer. Dalam teori William D. Coplin ini, selain mempertimbangkan *Policy influencers*, para pengambil kebijakan politik luar negeri juga harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika para pengambil kebijakan menyusun politik luar negeri. Karena para pengambil kebijakan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang di akibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer.

¹² William D. Coplin, *Op. Cit*, hal 81

Semua negara sedikit banyak bergantung pada negara-negara lain. Apakah itu dalam hal kekuatan ekonomi atau militer. Semakin negara itu bergantung pada suatu negara, maka semakin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar. Karena seluruh kegiatan ekonomi berkaitan dengan perdagangan, dan karena banyak barang yang diperdagangkan berarti berhubungan dengan industri pertahanan.

Bagi Jepang sendiri Asia merupakan pasar yang penting bagi laju perdagangan Internasionalnya. Jepang memiliki banyak kepentingan di kawasan ini. Baik bagi kepentingan ekonominya maupun kepentingan militernya. Sehingga Jepang sangat perlu untuk menenangkan situasi yang semakin panas tersebut. Dan juga keinginan Jepang untuk mengembangkan militernya untuk menjadi sebuah negara yang “normal” menjadi faktor tersendiri untuk mengembalikan citra positifnya dimata Internasional.

3. Konteks Internasional

Faktor yang terakhir adalah Konteks Internasional. Secara tradisional para analisis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku. Pergeseran tatanan politik dunia setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai oleh runtuhnya sistem bipolar dunia antara blok barat dan

blok timur membawa pengaruh sangat besar bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Jepang.

Situasi perpolitikan internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik saat itu, perimbangan kekuatan sangat dominan. Khususnya China dan Korea Utara. Ancaman-ancaman dari negara disekitar membuat pengambil kebijakan Jepang harus mengambil kebijakan sebagai respon, demi kelangsungan hidup negaranya. Jadi berdasarkan ketiga faktor tersebut yang menjadikan pertimbangan Jepang dalam menentukan arah kebijakan politik luar negerinya.

Pernyataan minta maaf tersebut yang disampaikan oleh Yohei Kono selaku Chief Cabinet Secretary saat itu, sangatlah tepat karena isu-isu yang telah berkembang pada waktu itu memang mengharuskan Pemerintah Jepang harus mengambil tindakan responsif untuk kejelasan disemua pihak. Hal ini ditujukan juga untuk menetralsir isu-isu yang nantinya dapat merugikan bagi negara Jepang.

D. Hipotesa

Dari rumusan permasalahan yang ada, yang kemudian didukung oleh latar belakang dan kerangka dasar pemikiran yang telah ditetapkan, maka penulis mengambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan politik minta maaf (Pernyataan Kono 1993) dikarenakan :

- Adanya tekanan dari dalam negeri menyangkut isu jugun ianfu.
- Jepang ingin mengamankan pasar perdagangan internasionalnya di Asia.
- Jepang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Negara-negara di Asia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Kono Statement (1993) merupakan perwujudan permohonan maaf pemerintah Jepang mengenai kasus Jugun Ianfu.
- b. Untuk mengaplikasikan berbagai macam sisi teoritis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- c. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur yang penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini, pengumpulan data

mempunyai banyak variasi yang kesemuanya tergantung pada situasi kondisi dan kemampuannya yang dimiliki oleh seorang peneliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder yaitu melalui berbagai literature seperti, majalah, Koran, internet, dan bacaan lainnya. Dimana dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti itu akan mempermudah penulis menyelesaikan penulisannya.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dalam penulisan ini dimulai dari tahun 1990-an sampai 1993. Dimana pada tahun 1990-an muncul pertama kalinya pemberitaan tentang Jugun Ianfu untuk khalayak umum. Sampai kemudian disampaikannya pernyataan maaf dari Pemerintah Jepang pada tahun 1993.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Bab Satu : Bab ini berupa Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pokok permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran,

Hipotesa, Tujuan Penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Sistematika penulisan, Kerangka Penulisan, Rencana Kepustakaan.

Bab Dua : Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah Jugun Ianfu terjadi.

Bab Tiga : Bab ini akan membahas tentang Kono Statement 1993 dan kebijakan-kebijakan Jepang yang berkaitan dengan kasus Jugun Ianfu.

Bab Empat : Bab ini akan menjelaskan mengapa Jepang mengeluarkan kebijakan politik mohon maaf mengenai kasus Jugun Ianfu.

Bab Lima : Bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan rangkuman dari argumen yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.